

KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI PADA PEMKAB MALANG)

Dyah Estu Kurniawati

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi : Jl. Ciliwung I/59 Malang
Telpon : 0341-479020, Hp: 81328347077, E-mail: dyahestu@umm.ac.id

ABSTRACT

In this era of globalization the implementation of regional autonomy can not be separated from the context of Indonesia's relationship with international actors both at the state level (state) and non-state (non-state). Currently local governments both at the provincial and district / city has been carrying out foreign cooperation for the promotion of social development, economic, and cultural. Although foreign relations is a central government, local governments inevitably have to face the process of liberalization of flows of goods, services, capital, and labor with all its implications for Indonesia's foreign policy.

Based on Law No.32/2004 on local government, the government was given the opportunity to cooperate with third parties in providing public services. Currently local governments are required to respond to the challenges and opportunities offered by the international community in various fields. Their responses could affect the overall course of building foreign relations and diplomacy Indonesia in terms of positive and negative. In a positive foreign relations conducted by the local government can support the policy of the central government in a negative relationship but it can also bring harm to the people of Indonesia through the process of exploitation due to the position of inequality and lack of coordination among government agencies. It is this that drives the researchers to investigate further on how development cooperation abroad undertaken by the government of Malang regency in this era of regional autonomy, given that Malang Regency has the potential of natural resources are very abundant.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di masa Orde Baru menerapkan konsep negara kesatuan sebagai logika politik ke dalam pembangunan ekonomi melalui UU No.5/1974 tentang Pemerintah Daerah. Hubungan yang bersifat sentralistis dan hirarkhis antara pemerintah pusat dan daerah tidak membawa pemberdayaan ekonomi rakyat di daerah. Pemerintah daerah hanya menjadi alat pemerintah pusat untuk mencapai tujuannya di daerah. Akibatnya ketimpangan antara pusat dan daerah menjadi semakin lebar. Prinsip utama yang digunakan adalah tetesan ke bawah atau *trickle down effect*. Kalau pertumbuhan ekonomi nasional tinggi maka dengan sendirinya akan menetes ke bawah dan meningkatkan pembangunan daerah.

Paradigma pembangunan ekonomi Orde Baru ternyata tidak terwujud. Sejalan dengan adanya gerakan reformasi, tuntutan otonomi daerah semakin mendapatkan bentuk melalui disahkannya UU Otoda No.37/1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004. Partisipasi pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi menjadi hal yang tak terhindarkan. Gejala ini dapat dilihat sebagai peluang bagi pembangunan daerah di Indonesia yang pada gilirannya akan memperkokoh pembangunan nasional. Memang secara politik pemerintah pusat telah menegaskan dalam berbagai ketentuan bahwa dalam menyelenggarakan kerjasama dengan pihak asing pemerintah daerah hendaknya memperhatikan esensi Negara Kesatuan

Republik Indonesia, stabilitas dan keamanan nasional dan prinsip *one-door policy*.

Menurut Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No.09/A/KP/XII/2006/1, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kerjasama dengan pihak luar negeri. *Pertama*, kerjasama internasional hanya dapat dilakukan dengan negara atau pemerintah yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Indonesia. *Kedua*, isi atau substansi kerjasama luar negeri harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam UU No.32/2004 dimana kewenangan pemerintah daerah menyangkut berbagai bidang yang memungkinkan daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing demi memajukan daerahnya. *Ketiga*, kerjasama internasional harus disetujui oleh DPRD yang secara formal mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. *Keempat*, kerjasama dengan pihak luar negeri oleh pemerintah daerah tidak boleh mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. *Kelima*, kerjasama dengan pihak asing tidak mengarah kepada campur tangan aktor internasional kedalam urusan atau yurisdiksi Indonesia sebagai negara berdaulat. *Keenam*, kerjasama dengan pihak asing hendaknya dilandaskan pada asas persamaan hak dan kedudukan serta saling menguntungkan dengan sikap saling menghormati. *Ketujuh*, kerjasama dengan pihak asing harus ditujukan untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pemberdayaan rakyat di daerah.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan yang telah diuraikan sebelumnya, Depdagri telah mengeluarkan Permendagri No.3/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Permendagri ini memuat berbagai hal seperti ketentuan umum, prinsip, bentuk, persyaratan, tata cara, prosedur, standar yang harus ditempuh pemerintah daerah, pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak asing.

Pemerintah daerah kini harus menghadapi persaingan internasional dalam bidang perdagangan, investasi serta pemanfaatan sumber

daya manusia. Namun pemerintah daerah juga berpeluang untuk melakukan kerjasama luar negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku. Gambaran ini menuntut penelusuran lebih dalam tentang pengembangan kerjasama luar negeri di era otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas wilayahnya dari 37 Kabupaten/ Kotamadya yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.348 km² atau sama dengan 334.800 ha dan jumlah penduduknya 2.346.710 (terbesar kedua setelah Kotamadya Surabaya). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu Kabupaten Malang juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

Tentunya masih banyak lagi potensi yang dimiliki oleh kabupaten ini seperti sektor properti dan UKM. Beberapa potensi itu akan membawa keberhasilan dan kesejahteraan bagi masyarakat jika mampu dimanfaatkan dengan optimal dengan melihat segala peluang yang ada baik melalui promosi maupun dengan membangun kerjasama dengan pihak luar negeri. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam era otonomi daerah ini pemerintah daerah berpeluang untuk melakukan kerjasama dengan luar negeri sehingga dapat memanfaatkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang hanya dapat digambarkan dengan kata-kata atau uraian tentang obyek yang diteliti dan tidak dapat dihitung atau diangkakan.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data hasil wawancara dengan pihak pertama yaitu pihak informan. Informan adalah bagian dari data suatu penelitian, melalui informan semua fakta-fakta bisa didapat, pemilihan informan ditentukan terlebih dahulu atau dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan jabatan yang akan memberikan informasi pada masing-masing bidang kerjanya. Pertanyaan yang diberikan kepada informan adalah hal yang tidak memojokkan dan tidak berkesan mengisolasi pada jabatan informan tersebut, tetapi secara umum agar informan merasa leluasa dalam menjawab sehingga penulis mendapat data-data yang akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang berupa dokumentasi, statistik, laporan kegiatan, publikasi, dll.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan metode-metode sebagai berikut:

- a. **observasi** adalah cara pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti di lokasi penelitian. Adapun observasi dilakukan dengan melihat kondisi geografis Kabupaten Malang serta meninjau beberapa komoditas dan bidang unggulan Kabupaten Malang.
- b. **Wawancara** adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu atau sebelumnya, selanjutnya menanyakan tiap-tiap pertanyaan yang diarahkan kepada informan seperti Kepala Disperindag Kabupaten Malang.
- c. **focus group study** adalah pengumpulan data dengan mengadakan sebuah diskusi tentang topik yang dibahas untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan yang berkembang sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih kaya. Metode inilah yang akan

menjadi metode utama dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan mengadakan *focus group study* dengan mengundang beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Malang.

- d. **Studi kepustakaan** adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji beberapa buku, literatur-literatur sebelumnya yang ada referensinya dengan riset yang dilakukan.

Metode Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif artinya setiap permasalahan yang akan muncul selalu diungkapkan secara lebih mendalam dan terperinci dengan menggunakan deskriptif kualitatif secara sistematis.

Dalam analisa data deskriptif ini peneliti juga menggunakan proses analisis informasi yaitu melalui beberapa proses berikut: informasi mentah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan informan dalam bentuk asli dari hasil wawancara disusun berdasarkan sistematik topik dan kriteria yang diperlukan. Kemudian dari informasi asli inilah dilakukan sejenis seleksi data yang diperoleh untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan deskriptif berupa ringkasan-ringkasan atau pilihan-pilihan pertanyaan yang merupakan aspek yang perlu dikaji lebih lanjut. Proses selanjutnya adalah interpretasi, peneliti harus mampu menunjukkan posisinya dengan memberikan analisis terhadap realitas sosial hasil penelitian berdasarkan keterangan teoritis tersebut. Melalui serangkaian proses inilah dihasilkan pemahaman yang mengarah pada jawaban permasalahan penelitian.

Metode Pengambilan Kesimpulan

Pada tahap akhir penelitian maka perlu dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil yang diteliti, yaitu penarikan kesimpulan yang

didasarkan pada data-data dan formulasi yang telah dianalisis untuk memecahkan masalah yang dikemukakan, dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum berdasarkan ke hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Malang

Karakteristik Geografi, Topografi, dan Demografi

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten terbesar di Propinsi Jawa Timur yang memiliki posisi strategis dengan luas wilayah 351.872.62 hektar. Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 377 desa.

Topografi Kabupaten Malang terdiri dari wilayah dataran, perbukitan, dan pegunungan dengan ketinggian hingga 3.600 meter di atas permukaan laut. Beberapa gunung mengelilingi wilayah Kabupaten Malang seperti Gunung Semeru, Gunung Kelud, Gunung Welirang, dan Gunung Arjuno. Selain itu wilayah Kabupaten Malang juga berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di wilayah bagian selatan. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Malang sebagian besar adalah tanah andosol yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, selain itu di beberapa daerah selatan cenderung berkapur karena banyak terdapat bukit-bukit kapur. Curah hujan 1,0 mm – 550 mm dan suhu rata-rata 23 derajat.

Jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2008 adalah 2.442.422 jiwa dengan tingkat kepadatan 694 jiwa/km². Alokasi tenaga kerjanya adalah 673.841 jiwa atau 27,59%.

Potensi Ekonomi

Pada tahun 2008 perekonomian Kabupaten Malang terbesar disumbang oleh sektor pertanian sebesar 30,46% diikuti dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 23,97% sementara kontribusi dari sektor industri pengolahan sebesar 18,37%.

Berdasarkan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 2008 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 24.698.863,17 milyar, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2008 sebesar 5,76% dengan nilai inflasi 7,61%. Sedangkan pendapatan perkapita yang menyatakan rata-rata nilai bruto yang dihasilkan setiap penduduk di Kabupaten Malang secara nominal terus menerus meningkat dari Rp. 5,54 juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 8,22 juta pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 lebih dari Rp. 9 juta.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Upah Minimum Kabupaten Malang pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 945.373 per bulan, meningkat 15,7% dari tahun 2008. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan memperbaiki daya beli masyarakat.

Kondisi Sosial Budaya

Dari sudut pandang sejarah, Kabupaten Malang pernah menjadi pusat dari beberapa kerajaan yaitu Kerajaan Kanjuruhan abad ke-8, Kerajaan Purwa abad ke-11, Tumapel abad ke-12, dan Kerajaan Singosari pada abad ke-13. Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut memberikan warna pada karakteristik, tradisi, pakaian, makanan, bahasa, dan dialek masyarakat Kabupaten Malang.

Salah satu ciri khas masyarakat Kabupaten Malang adalah rasa kebersamaan yang tinggi sebagai bentuk kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain yang terwujud melalui partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam berbagai acara adat dan nasional. Kondisi sosial budaya ini mempengaruhi terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Industri dan Perdagangan

Data dari pusat statistik menunjukkan bahwa industri utama di Kabupaten Malang adalah industri kimia, karet, dan bahan dari plastik sebesar 40,72%, industri barang-barang logam 17,96%, dan sisanya industri lainnya. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 93.915 orang dengan komposisi terbanyak yaitu industri pengolahan makanan,

minuman, dan tembakau kemudian 20,97% industri kimia, karet, dan bahan dari plastik.

Jumlah total industri yang ada yaitu 1.380 unit industri yang terdiri dari 1.116 unit industri kecil dan 234 unit industri sedang dan besar. Nilai investasi di sektor industri selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai investasi di sektor industri tahun 2007 sebesar Rp. 2.261.840.594.000,00 dan meningkat menjadi Rp. 2.348.681.029.000,00 di tahun 2008 dan hingga pertengahan tahun 2009 mencapai Rp. 2.401.682.354.000,00.

Di bidang perdagangan, nilai ekspor Kabupaten Malang pada tahun 2008 naik 1,41% dari USD 262 juta menjadi USD 266 juta. Komoditas dari Kabupaten Malang yang diekspor antara lain plastik, tekstil, furniture, kerajinan, handycraff, perabot rumah tangga, kopi, udang, dan produk olahan lainnya dengan tujuan ekspor ke 62 negara diantaranya Amerika, Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia.

Kondisi Investasi

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah tujuan investasi yang potensial di Jawa Timur. Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Malang hingga tahun 2009 semester I tercatat 39 perusahaan yang berstatus PMA dan PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 6.115.364.874.177,00. Selain itu ada juga kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan non PMA/PMDN dan koperasi sebesar Rp. 5.653.739.354.000,00. Dengan demikian total kegiatan investasi di Kabupaten Malang baik dari perusahaan PMA/PMDN maupun non PMA/PMDN adalah sebesar Rp. 11.766.104.228.177,00. Investasi PMA sebanyak 19 unit usaha dengan nilai investasi yang selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Peluang Investasi

Terdapat dua peluang investasi utama di Kabupaten Malang, yaitu pengembangan kawasan agropolitan Poncokusumo dan pengembangan

kawasan pelabuhan Sendang Biru. Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan wilayah Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan Agropolitan berdasarkan potensi sektor pertanian, yaitu sayuran dan buah-buahan. Wilayah Poncokusumo sangat strategis karena berdekatan dengan Bandara Abdul Rrahman Saleh Malang dan lokasi wisata Gunung Bromo serta Gunung Semeru dan didukung daerah penyangga yang meliputi Kecamatan Pakis, Wajak dan Tumpang. Secara umum Agropolitan Poncokusumo masih memerlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agropolitan baik dari kegiatan onfarm maupun offfarm.

Sedangkan kawasan Pelabuhan Sendang Biru dikembangkan karena memiliki potensi kelautan dan perikanan. Kegiatan utamanya adalah perikanan tangkap yang disamping menghasilkan ikan segar juga dapat menghasilkan produk olahan seperti abon, terasi, kerupuk, dll. Sedangkan kegiatan pendukungnya adalah wisata pantai yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung pariwisata (hotel, restoran) dan linkage antara kawasan pelabuhan dengan perkotaan.

Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Malang

USAID (2000-2001)

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan USAID adalah *Local Government Support Program* (LGSP). Isinya adalah pemberian materi dan pendampingan dalam tata kelola pemerintahan desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakatnya dan tidak berupa dana segar (*fresh money*). Output dari program ini adalah desa diharapkan mampu membuat Rencana Pembangunan Desa sebagai hasil dari musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat desa. Targetnya adalah adanya akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen pemerintahan desa.

Dari program ini Pemerintah Kabupaten Malang berhasil menerbitkan buku panduan tentang pendampingan pemerintah desa yang kemudian

dijadikan acuan bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan program LGSP tersebut.

ILO (2008-2009)

Bentuk kerjasama dengan International Labour Organization (ILO) yaitu organisasi perburuhan internasional di bawah PBB ini bernama Proyek JOY (*Job Opportunities for Youth*), yaitu untuk membantu Pemerintah Kabupaten Malang khususnya dalam mengurangi pengangguran khususnya kaum muda.

JOY memiliki dua komponen kegiatan yaitu kebijakan dan LED (Local Economic Development/ Pengembangan Ekonomi Daerah). Komponen kebijakan melihat bagaimana kebijakan pada berbagai tingkat (nasional, propinsi, dan kabupaten) serta infrastruktur pendukung, khususnya dari pemerintah mampu mendorong terciptanya lapangan kerja bagi kaum muda. Pendekatan ini melihat langkah-langkah strategis dari atas ke bawah. Komponen LED, disisi lain, melihat bagaimana inisiatif pelaksanaan di lapangan dapat menciptakan lapangan kerja. Kegiatan ini menekankan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat/swasta, dan inisiatif dari bawah ke atas untuk peningkatan ekonomi daerah. Dengan adanya dua komponen kegiatan, diharapkan JOY dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam upaya mengurangi pengangguran.

KOICA (2008-2010)

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan KOICA (*Korea International Cooperation Agency*) berupa *Korea Junior Expert (KJE) Program (World Friend Korea)*. Dalam program KJE, KOICA mengirimkan sukarelawan Korea ke Kabupaten Malang untuk bertukar keahlian, pengetahuan, dan pengalaman mereka dengan tujuan turut berkontribusi secara langsung dalam pengembangan sosial ekonomi di Kabupaten Malang. Bidang keahlian mereka antara lain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), komputer/IT, taekwondo, dan pembelajaran Bahasa Korea. Kriteria dari tenaga KJE ini adalah pria dan wanita

berkewarganegaraan Korea Selatan, memiliki minimal gelar sarjana serta pengalaman kerja dan ketrampilan tinggi, dan periode masa tugas adalah dua tahun.

Program ini bertujuan untuk membagi pengalaman pembangunan sosial antara Korea dengan Indonesia, meningkatkan rasa saling pengertian antara masyarakat mendukung pertukaran budaya dan bahasa antara Korea dan Indonesia secara praktis.

Tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Malang

Terkait dengan kerjasama luar negeri, tantangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya adalah: (1) menciptakan kondisi yang kondusif di daerah bagi pertumbuhan ekonomi lokal, (2) mendorong upaya-upaya mewujudkan kemandirian daerah, (3) memiliki kemampuan bersaing secara global, serta (4) di masa mendatang bahkan dapat berperan selaku negara donor (mampu mengirimkan tenaga ahli Indonesia ke luar negeri, mampu menjadi tujuan tempat belajar, dll).

Untuk Pemerintah Kabupaten Malang sendiri, tantangan yang nyata adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan selama ini masih mengandalkan jaringan (network) dari pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat (Depdagri). Hal ini dipengaruhi oleh masih minimnya tenaga ahli (*expert*) dalam bidang kerjasama luar negeri di kalangan pemda.

KESIMPILAN DAN SARAN

Kesimpulan

Acuan Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan kerjasama internasional selama ini adalah pihak donor harus menyesuaikan dengan strategi atau program yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Saran

1. Kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah hendaknya dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata daerah yang berskala prioritas tinggi, teridentifikasi secara

jelas dengan menggunakan indikator masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampaknya serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh pihak luar negeri sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.

2. Kerjasama luar negeri merupakan salah satu opsi alternatif (komplementer) bagi pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah dan hendaknya tidak dijadikan ketergantungan.

Widodo, JB., 2003. Pengembangan Kerjasama Internasional untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, makalah disampaikan dalam Seminar Forum Komunikasi Jurusan Hubungan Internasional se-Indonesia, di Hotel Jayakarta, Yogyakarta. Pemakalah adalah Direktur Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik Departemen Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Imawan, Riswanda. 2002. Peningkatan Daya Saing: Pendekatan Paradigmatik- Politis, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 6, Juni.

Jatmika, Sidik. 2001. Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional , BIGRAF Publishing, Yogyakarta.

Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktek , Graha Ilmu, Yogyakarta.

Nugroho, Heru. 1996. Perdagangan Bebas dan Liberalisasi Politik di Indonesia , makalah pada Seminar Dies Natalis Fisipol UGM ke-41 dengan Tema “Pergeseran Sosial Politik dalam Era Globalisasi”, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Luar Negeri RI No.09/A/KP/XII/2006/1 tentang Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.3/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Shofi Inayati, Ratna. 1997. Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Perdagangan, dalam Jurnal PPW-LIPI.

Syaukani. 2003. Welcome Investor di Era Otonomi Daerah, Nuansa Madani, Jakarta.